

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung unit eselon 1 Sekretariat Jenderal (01) Audited tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 60.450.979,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Negara secara netto pada 31 Desember TA 2018 adalah sebesar Rp 28.979.058.285,- atau mencapai 96,39 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 30.075.448.000,-.(netto).

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018 . Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp 417.730.600.338 ,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 14.861.900,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0 ; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 417.729.261.604,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar 78.520.834.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp14.467.979,- dan Rp 417.716.132.359,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 7.792.170,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 29.662.445.118,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 29.654.652.948,-). pendapatan pelepasan aset non lancar (Rp 49.439.000,-) dan beban pelepasan aset non lancar Rp 29.125.000,- . Surplus dari kegiatan non operasional lainnya Rp 5.892.009,- dan pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya Rp 6.941.219,- beban dari kegiatan non operasional lainnya Rp 1.094.210,- defisit dari kegiatan non operasional (Rp26.206.009,-) defisit sebelum pos luar biasa (Rp29.628.446.939,-) sehingga entitas mengalami defisit (Rp 29.628.446.939,-)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp52.212.992.037,- ditambah Defisit-LO sebesar (Rp 29.628.446.939,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 366.305.023.955- selisih revaluasi aset Rp 370.168.014.177,- dan Koreksi nilai aset non revaluasi (Rp 3.662.990.222,-) Transaksi Antar Entitas senilai Rp28.918.607.306,- .terdapat kenaikan Rp 365.595.184.322,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp417.716.132.359,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UNIT ESELON 1 SEKRETARIAT JENDERAL (01) AUDITED
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2018 DAN 2017**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2018		% thd Angg	TA 2017
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	60,450,979		79,158,494
JUMLAH PENDAPATAN		-	60,450,979	0.00	79,158,494
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	12,500,541,000	12,387,466,122	99.10	11,641,869,645
Belanja Barang	B.4	15,519,461,000	14,576,301,500	93.92	12,429,590,773
Belanja Modal	B.5	2,055,446,000	2,015,290,663	98.05	1,733,601,245
Belanja Bantuan Sosial	B.6				
JUMLAH BELANJA		30,075,448,000	28,979,058,285	96.35	25,805,061,663

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UNIT ESELON 1 SEKRETARIAT JENDERAL (01) AUDITED
NERACA
PER 31 Desember 2018 DAN 2017**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3		
Piutang Bukan Pajak	C.4		
Bagian Lancar TP/TGR	C.5		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7		
Belanja Dibayar di Muka	C.8		
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9		
Persediaan	C.10	14,861,900	13,506,350
persediaan belum register		-	
Jumlah Aset Lancar		14,861,900	13,506,350
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11		
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13		
Jumlah Piutang Jangka Panjang			
ASET TETAP			
Tanah	C.14	372,921,655,000	16,094,222,578
tanah belum register		-	
Peralatan dan Mesin	C.15	20,218,121,758	19,434,551,923
peralatan mesin belum register		-	
Gedung dan Bangunan	C.16	42,997,860,863	38,589,791,443
gedung dan bangunan belum register		-	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	134,951,500	158,400,500
Aset Tetap Lainnya	C.19	528,321,150	528,321,150
Konstruksi dalam pengerjaan	C.20	-	28,900,000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.21	(19,071,648,667)	(22,607,555,407)
Jumlah Aset Tetap		417,729,261,604	52,226,632,187
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.22	5,940,000	5,940,000
Aset Lain-Lain	C.23	766,494,044	1,532,677,631
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.24	(693,913,210)	(1,531,662,255)
Jumlah Aset Lainnya		78,520,834	6,955,376
JUMLAH ASET		417,822,644,338	52,247,093,913
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	14,467,979	34,101,876
Pendapatan Diterima di Muka	C.26		
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		14,467,979	
JUMLAH KEWAJIBAN		14,467,979	34,101,876
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	417,808,176,359	52,212,992,037
JUMLAH EKUITAS		417,808,176,359	52,212,992,037
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		417,822,644,338	52,247,093,913

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UNIT ESELON 1 SEKRETARIAT JENDERAL (01) AUDITED
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2018 DAN 2017**

(Dalam Rupiah)

KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	7.792.170	5.062.920
JUMLAH PENDAPATAN		7.792.170	5.062.920
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	12.382.929.122	11.652.770.631
Beban Persediaan	D.3	268.277.716	263.046.180
Beban Barang dan Jasa	D.4	7.273.049.603	5.718.481.463
Beban Pemeliharaan	D.5	2.015.871.420	1.943.797.977
Beban Perjalanan	D.6	5.014.606.514	4.514.132.625
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	2.707.710.743	2.309.692.220
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUNLAH BEBAN		29.662.445.118	26.401.921.096
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(29.654.652.948)	(26.396.858.176)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		20.314.000	(125.349.800)
Defisit Penjualan Aset Nonlancar		49.439.000	48.300.000
Beban Pelepasan Aset Nonlancar		29.125.000	173.649.800
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		5.892.009	25.772.884
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		6.941.219	26.252.574
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.049.210	479.690
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		26.206.009	(99.576.916)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(29.628.446.939)	(26.496.435.092)
POS LUAR BIASA	D.12		
Beban Luar Biasa		-	-
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/ DEFISIT - LO		(29.628.446.939)	(26.496.435.092)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UNIT ESELON 1 SEKRETARIAT JENDERAL (01) AUDITED
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2018 DAN 2017**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	E.1	52,212,992,037	49,834,754,350
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(29,628,446,939)	(26,496,435,092)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	366,305,023,955	1,712,369,610
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1		
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3		
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	370,168,014,177	2,540,000,107
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	(3,862,990,222)	(827,630,497)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6		
JUMLAH			
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	28,918,607,306	27,162,303,169
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		365,595,184,322	2,378,237,687
EKUITAS AKHIR	E.5	417,808,176,359	52,212,992,037

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Unit Eselon 1 Sekretariat Jenderal (01)

Dasar

TUGAS

Hukum

Entitas dan

Rencana

Strategis

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama

FUNGSI

1. Menetapkan Visi, Misi dan Kebijakan di bidang Administrasi;
2. Mengkordinasikan kegiatan dan penyiapan Visi, Misi dan Kebijakan Kementerian;
3. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi perencanaan, keuangan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya, hukum dan kerjasama luar negeri, informasi keagamaan dan hubungan masyarakat serta kerukunan umat beragama untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;
4. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian kordinator, Kementerian Negara, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Lembaga lain

yang terkait;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

SUSUNAN ORGANISASI

1. Biro Perencanaan
2. Biro Kepegawaian
3. Biro Keuangan dan BMN
4. Biro Organisasi dan Tata Laksana
5. Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
6. Biro Umum
7. Pusat Kerukunan Umat Beragama
8. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat

Visi dan Misi Kementerian Agama

VISI

"Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" (Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015)

MISI

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas

4. Meningkatkan pemaafaata dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya

(Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015)

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung unit eselon 1 Sekretariat Jenderal (01) AUDITED tahun 2018 menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang

telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung unit eselon 1 Sekretariat Jenderal (01) tahun 2018 dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

A.5. Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Audited tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung unit eselon 1 Sekretariat Jenderal (01) Audited tahun 2018 adalah sebagai berikut:

*Pendapatan
-LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
-LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan lelang BMN diakui pada saat barang yang dilelang sudah dibayar oleh pemenang lelang.
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan

di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang
- dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran
- d. untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak
- berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung unit eselon 1 Sekretariat Jenderal (01) tahun 2018 telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya kekurangan belanja pegawai (pagu minus belanja pegawai) sehingga perlu penambahan pagu dan revisi dipa. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2018	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa		
Pendapatan Lain-lain		
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	12,421,189,000	12,500,541,000
Belanja Barang	15,662,956,000	15,519,461,000
Belanja Modal	1,947,561,000	2,055,446,000
Belanja Bantuan Sosial		
Jumlah Belanja	30,031,706,000	30,075,448,000

Realisasi

Pendapatan

Rp60.450.979,-

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 60.450.979,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung unit eselon 1 Sekretariat Jenderal (01) tahun 2018 berasal dari Pendapatan sewa, Pendapatan pemindahtanganan BMN, pendapatan lain – lain (berupa

penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu). Pendapatan sewa berasal dari sewa rumah dinas yang ada di lingkungan Kementerian agama provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagaiberikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2018

Uraian	31-Des-18		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
pendapatan dari pengelolaan BMN	-	55.660.720	
pendapatan denda	-	1.570.450	
pendapatan lain-lain		3.219.809	
Jumlah	-	60.450.979	

Realisasi Pendapatan TA 2018 mengalami penurunan sebesar 23,63% dibandingkan realisasi TA 2017. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan pemindahtanganan BMN, penurunan sewa bangunan, penurunan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2018 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
pendapatan dari pengelolaan BMN	55,660,720	53,362,920	
pendapatan denda	1,570,450	-	
pendapatan lain-lain	3,219,809	25,795,574	
Jumlah	60,450,979	79,158,494	

Realisasi

B.2. BELANJA

Belanja

Negara Rp

28.979.058.285-

(netto)

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp28.979.058.285,- atau 96,35 % dari anggaran belanja sebesar Rp 30.075.448.000,- .Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember TA 2018 tersaji sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember
2018*

Uraian	31 Desember 2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	12.500.541.000	12.398.650.219	99,18
Belanja Barang	15.519.461.000	14.576.301.500	93,92
Belanja Modal	2.055.446.000	2.015.290.663	98,05
Belanja Bantuan Sosial			
Total Belanja Kotor	30.075.448.000	28.990.242.382	96,39
Pengembalian Belanja	-	(11.184.097)	
Total Belanja	30.075.448.000	28.979.058.285	96,35

Realisasi Belanja 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 12,30 % dibandingkan realisasi belanja pada TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain:

1. terdapat pegawai yang mutasi ke kanwil kementerian agama provinsi kepulauan bangka belitung
2. terdapat peningkatan belanja barang
3. terdapat peningkatan belanja modal berupa pembangunan PTSP, pengadaan laptop dan printer.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan 2017(netto)

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	12,387,466,122	11,641,869,645	6.40
Belanja Barang	14,576,301,500	12,429,590,773	17.27
Belanja Modal	2,015,290,663	1,733,601,245	16.25
Belanja Bantuan Sosial			
Jumlah	28,979,058,285	25,805,061,663	12.30

Belanja

Pegawai

Rp12.387.466.12

2,- (netto)

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp12.387.466.122,- dan Rp11.641.869.645,- . Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 6,40 persen dari realisasi belanja TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.
2. Penambahan remunerasi PNS dan kenaikan pangkat PNS

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7.374.938.597	7.152.511.418	3,11
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	150.000.000	24.000.000	525,00
Belanja Honorarium			
Belanja Lembur			
Belanja Tunjangan Khusus	4.873.711.622	4.483.129.176	8,71
Jumlah Belanja Kotor	12.398.650.219	11.659.640.594	6,34
Pengembalian Belanja Pegawai	(11.184.097)	(17.770.949)	(37,07)
Jumlah Belanja	12.387.466.122	11.641.869.645	6,40

Belanja

Barang

*Rp14.576.301.500,
- (bruto)*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp14.576.301.500,- dan Rp12.429.590.773,-. Realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami peningkatan 17,27 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja jasa dan belanja pemeliharaan serta biaya perjalanan dinas .

Perbandingan Belanja Barang TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	4.086.956.138	3.401.927.045	20,14
Belanja Barang Non Operasional	1.666.873.816	1.332.061.000	25,13
Belanja Barang Persediaan	281.992.356	290.004.570	
Belanja Jasa	1.525.032.546	972.196.506	56,86
Belanja Pemeliharaan	2.000.840.130	1.919.269.027	4,25
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.014.606.514	4.514.132.625	11,09
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.			
Jumlah Belanja Kotor	14.576.301.500	12.429.590.773	17,27
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	14.576.301.500	12.429.590.773	17,27

Belanja Modal

*Rp2.015.290.663-
(bruto)*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 2.015.290.663,- dan Rp 1.733.601.245,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan

aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 16,25 % dibandingkan TA 2017 disebabkan oleh kenaikan belanja modal tanah, peralatan dan mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A 2018	REALISASI T.A 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	49.950.000		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	900.276.800	486.930.500	84,89
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.065.063.863	1.207.170.745	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Belanja Modal Lainnya		39.500.000	
Jumlah Belanja Kotor	2.015.290.663	1.733.601.245	16,25
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	2.015.290.663	1.733.601.245	16,25

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp49.950.000,- dan Rp0. Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan ada pengurukan dan pematangan tanah pada Kankemenag kabupaten Belitung.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah			
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah			
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah			
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	49,950,000		
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah			
Jumlah Belanja Kotor	49,950,000	0	
Pengembalian Belanja Modal	0	0	
Jumlah Belanja	49,950,000	0	

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember TA 2018 adalah sebesar Rp 900.276.800,- mengalami kenaikan sebesar 84,89 persen bila dibandingkan dengan TA 2017 yaitu sebesar Rp 486.930.500,-

Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan gedung baru yang diikuti dengan penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas gedung.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

31 Desember TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	900.276.800	486.930.500	84,89
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin			
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin			
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin			
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian			0,00
Jumlah Belanja	900.276.800	486.930.500	84,89

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 1.065.063.863,- dan Rp 1.733.601.245 ,-. Realisasi belanja gedung dan bangunan TA 2018 mengalami kenaikan karena adanya penambahan nilai gedung yaitu pengembangan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
31 Desember TA 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	587.408.500	1.207.170.745	
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	477.655.363		
Jumlah Belanja Kotor	1.065.063.863	1.207.170.745	
Pengembalian Belanja Modal			
Jumlah Belanja	1.065.063.863	1.207.170.745	

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp dan Rp 0. Realisasi TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan realisasi tahun anggaran lalu. Hal ini disebabkan tidak ada penambahan jaringan teknologi informasi di semua satuan kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam rangka mendukung rencana strategis.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

31 Desember TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan			
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan			
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Modal			
Jumlah Belanja	0	0	

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 39.500.000,-. Realisasi TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan tidak ada pengadaan *software* pendapatan untuk implementasi akuntansi berbasis akrual di seluruh satuan kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 0% dibandingkan TA 2018. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok

masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2018 dan 2017*

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A 2017	NAIK (TURUN) %
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi Istimewa Papua			
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi Istimewa Biak			
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi Istimewa Merauke			
Jumlah Belanja Kotor	0	0	
Pengembalian	0	0	
Jumlah Belanja	0	0	

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Uang tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2018 dan 2017

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Uang Tunai		
Rekening Bank		
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0 **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0. dan Rp 0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2018 dan 2017

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		
Kas Lainnya dari Hibah		
Jumlah	-	-

Piutang PNBPNP Rp0 **C.4 Piutang PNBPNP**

Saldo Piutang PNBPNP per tanggal 31 Desember 2018 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang PNBPNP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBPNP disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBPNP TA 2018 dan 2017

Uraian	TH 2018	TH 2017
Piutang PNBPNP		
Piutang Lainnya		
Jumlah	-	

Bagian Lancar TP/TGR Rp0 **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Bagian Lancar TPA Rp0 **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan,

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Rp0 **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan piutang tak tertagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar pada tanggal pelaporan.

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp0*

C.8 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2018 dan 2017

Jenis	TH 2018	TH 2017
Pembayaran Internet		
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin		
Pembayaran Sewa Gedung Kantor		
Jumlah	-	-

*Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima Rp0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Diterima TA 2018 dan 2017*

Jenis	TH 2018	TH 2017
Pendapatan Jasa Pelatihan		
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		
Jumlah	-	-

Persediaan

C.10 Persediaan

Rp.14.861.900,-

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp14.861.900,- dan Rp13.506.350,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2018 dan 2017

Persediaan	TH 2018	TH 2017
Barang Konsumsi	14.861.900	13.506.350
Barang untuk Pemeliharaan		
Suku Cadang		
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		
Persediaan Lainnya		
Jumlah	14.861.900	13.506.350

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

TP/TGR Rp0

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi (TP/TGR) per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan

Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai

bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian TagihanTuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) TA 2018 dan 2017

No	Debitur per Satker	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Satker kanwil babel		
2	Kankemenag kota pangkalpinang		
3	kankemenag kab bangka barat		
4	kankemenag kab bangka tengah		
Jumlah			

*Tagihan
Penjualan
Angsuran

Rp0*

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar

Rp0 dan Rp0. Rincian TPA untuk tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

No	Debitur	TH 2017	TH 2016
1	satker kanwil babel		
2	kankemenag kota pangkalpinang		
3	kankemnag kab bangka barat		
4	kankemenag kab bangka tengah		
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2018

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar		0.50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar		0.50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah

Rp372.921.655.00

0,-

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung unit eselon 1 Sekretariat Jenderal (01) tahun 2018 per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp372.921.655.000,- dan Rp16.094.222.578,-. Terjadi kenaikan nilai tanah karena adanya revaluasi aset tanah yang dilakukan oleh KPKNL Pangkalpinang. Tanah dinilai dengan harga yang sekarang. Sehingga nilai di neraca bertambah lebih besar dibanding tahun 2017.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	Rp	16,094,222,578
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	49,950,000
Hibah	Rp	-
Revaluasi aset	Rp	356,777,482,422
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2018	Rp	372,921,655,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp	372,921,655,000

Peralatan dan **C.15 Peralatan dan Mesin**

Mesin Rp
20.218.121.758,-

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp20.218.121.758,- dan Rp19.434.551.923,-. Mutasi nilai peralatan dan mesin karena pembelian yang dilakukan satker - satker tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	Rp	19.434.551.923
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	783.569.835
Hibah		
Transfer Masuk		
Reklasifikasi Masuk		
Koreksi tambah		
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan		
Penghapusan		
Saldo per 31 Desember 2018	Rp	20.218.121.758
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	Rp	(17.512.053.412)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp	2.706.068.346

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan*

Rp42.997.860.863,

-

C.16 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp42.997.860.863,- dan Rp38.589.791.443,-. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	38.589.791.443
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	4.408.069.420
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2018	42.997.860.863
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	(1.538.618.217)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	41.459.242.646

Mutasi tambah:

- Penambahan nilai gedung baru berupa ruangan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), di satker Kanwil Kemenag Provinsi Kep. Bangka Belitung
- Penambahan nilai gedung berupa ruangan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di satker Kabupaten Bangka Selatan.

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan*

Rp134.951.500,

-

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp134.951.500,- dan Rp158.400.500,-. Tidak ada penambahan berupa pembelian ataupun hibah. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	158.400.500
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	(2.471.962)
Saldo per 31 Desember 2018	155.928.538
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	(20.977.038)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	134.951.500

Aset Tetap

Lainnya

Rp528.321.150,

-

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp 528.321.150,- dan Rp528.321.150,-. Aset tetap lainnya terdiri dari aset tetap renovasi sebesar Rp 149.920.000,- dan aset tetap lainnya sebesar Rp 378.401.150. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	528,321,150
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2018	528,321,150
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	
Nilai Buku per 31 Desember 2018	528,321,150

Konstruksi

dalam

Pengerjaan

Rp0,-

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp 28.900.000,- yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan pada Kantor Kementerian Agama kabupaten Bangka yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	28.900.000
-----------------------------------	-------------------

Mutasi tambah:	
Pembelian	0

Mutasi kurang:	
Penyelesaian KDP menjadi gedung	28.900.000

Saldo per 31 Desember 2018	0
-----------------------------------	----------

Nilai Buku 31 Desember 2018	0
------------------------------------	----------

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
(Rp19.071.648.6
67,-)*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing (Rp19.071.648.667,-) dan (Rp 22.607.555.407,-). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018

Saldo per 31 Desember 2017	528,321,150
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2018	528,321,150
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	
Nilai Buku per 31 Desember 2018	528,321,150

*Aset Tak
Berwujud
Rp5.940.000,-*

C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp 5.940.000,- dan Rp 5.940.000,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum

tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Software Komputer	5,940,000
ATB Lainnya	0
	5,940,000

Mutasi:

Saldo per 31 Desember 2017	Rp	5,940,000
Mutasi tambah:		
pembelian	Rp	-
Saldo per 30 september 2018	Rp	5,940,000
Amortisasi	Rp	(4,455,000)
Nilai Buku per 30 september 2018	Rp	1,485,000

Mutasi tambah:

- Pembelian software komputer untuk internet berupa website senilai Rp 5.940.000,

Aset Lain-Lain
Rp766.494.044,

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp766.494.044,- dan Rp1.532.677.631,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung unit eselon 1 Sekretariat Jenderal (01) Audited tahun 2018 serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	Rp	1,532,677,631
Mutasi tambah:		
- reklasifikasi dari aset tetap	Rp	-
Mutasi kurang:		
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan		
- penghapusan BMN	Rp	(766,183,587)
Saldo per 31 Desember 2018	Rp	766,494,044
Akumulasi Penyusutan	Rp	(688,715,710)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp	77,778,334

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
(Rp693.913.210
,-)*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar (Rp 693.913.210,-) dan (Rp 1.531.662.255,-). Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Software	5,940,000	(5,197,500)	742,500
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam opresai	766,494,044	(688,715,710)	77,778,334
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	772,434,044	(693,913,210)	78,520,834

Akumulasi penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi

Uang Muka dari KPPN Rp0.

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN

No	Uraian	Tahun 2018
1	kanwil babel	-
2	kankemenag kota pangkalpinang	-
3	kankemenag Bangka	-
4	kankemenag Bangka Tengah	-
5	kankemenag Bangka Selatan	-
6	kankemenag Bangka Barat	-
7	kankemenag kab. Belitung	-
9	kankemenag kab. Belitung Timur	-
Jumlah		-

Utang kepada Pihak Ketiga Rp14.467.979,-

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp14.467.979,- dan Rp34.101.876,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar atau beban yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung unit eselon 1 Sekretariat Jenderal (01) tahun 2018 Audited per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	uang makan belum disetor	Rp -
2	TPG	Rp -
3	Belanja Barang yang masih harus dibayar	Rp 14,467,979
Total		Rp 14,467,979

*perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
TA 2018 dan TA 2017*

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		4.537.000
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	14.467.979	29.564.876
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar		
Jumlah	14.467.979	34.101.876

*Pendapatan
Diterima di
Muka Rp0*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan Swasta	-	
Instansi Pemerintah Lainnya	-	
Badan Lainnya	-	
Total	-	

Ekuitas

C.27 Ekuitas

Rp417.808.176.

359

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 417.808.176.359- dan Rp 52.212.992.037,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
PNBP
Rp7.792.170,-*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 7.792.170,- dan Rp 5.062.920,-.Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2018
dan 2017*

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	7,792,170	5,062,920	53,9
Pendapatan Lain-lain			
Jumlah	7,792,170	5,062,920	53,9

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pemindahtangan BMN dan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan.

*Beban
Pegawai
Rp12.382.929.122
,-*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp12.382.929.122,- dan Rp11.652.770.631,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	5,156,316,306	5,083,370,030	1
Beban Tunjangan-Tunjangan	6,447,290,913	5,803,794,764	11
Uang makan	790,506,000	783,376,785	1
pengembalian belanja pegawai	(11,184,097)	(17,770,949)	(37)
Jumlah	12,382,929,122	11,652,770,630	6

Beban

Persediaan

Rp268.277.716,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 268.277.716,- dan Rp 263.046.180,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Pada Tahun 2018 masih ada beban persediaan pita cukai, materai dan salah input kode persediaan di aplikasi persediaan sehingga masih ada di neraca percobaan. Begitu juga beban bahan baku masih ada di neraca karena ada salah kode penginputan di aplikasi persediaan. Seharusnya diinput di barang kode barang konsumsi. Pada Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan 31 Desember TA 2018
dan 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	265.658.516	259.104.180	2,53
beban persediaan pita cukai materai ledges	1.575.000	2.100.000	(25,00)
beban persediaan bahan baku	139.200	948.000	(85,32)
beban persediaan lainnya	905.000	894.000	1,23
Jumlah Beban Persediaan	268.277.716	263.046.180	1,99

Beban Barang dan Jasa **D.4 Beban Barang dan Jasa**

dan Jasa

Rp7.273.049.603,

-

Beban Barang dan Jasa TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 7.273.049.603,- dan Rp5.718.481.463,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap,dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban keperluan perkantoran	2.491.324.198	2.248.797.036	10,78
Beban penambah daya tahan tubuh	13.200.000	127.862.000	-89,68
Beban pengiriman surat dinas pos pusat	102.000	544.050	-81,25
Beban honor Operasional satuan kerja	928.730.000	915.880.000	1,40
Beban barang operasional lainnya	650.516.200	110.590.500	488,22
Beban bahan	663.083.816	478.556.000	38,56
beban honor output kegiatan	523.300.000	478.080.000	9,46
Beban barang non operasional lainnya	110.490.000	375.425.000	-70,57
beban barang pemberian bantuan operasional dalam	370.000.000		#DIV/0!
Beban langganan listrik	471.390.083	434.622.636	8,46
Beban langganan telpon	16.245.380	15.883.819	2,28
Beban langganan air	6.662.868	8.432.731	-20,99
Beban langganan daya dan jasa lainnya	8.016.058	8.636.691	-7,19
Beban sewa	417.235.000	15.000.000	2681,57
Beban jasa profesi	539.970.000	494.171.000	9,27
beban jasa lainnya	53.500.000	6.000.000	
beban ekstrakomtabel peralatan mesin	9.284.000		
Jumlah	7.273.049.603	5.718.481.463	27,18

Beban

D.5 Beban Pemeliharaan

Pemeliharaan

Rp2.015.871.420,

-

Beban Pemeliharaan TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.015.871.420,- dan Rp1.943.797.977,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	Th 2017	NAIK (TURUN) %
beban pemeliharaan gedung dan bangunan	1.305.068.482	1.189.510.220	9,71
beban pemeliharaan gedung bangunan lainnya	46.764.854	43.530.000	7,43
beban pemeliharaan peralatan mesin	649.006.794	560.055.870	15,88
beban persediaan suku cadang	46.000	126.173.000	-99,96
beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	14.985.290	24.528.950	-38,91
beban bahan bakar minyak		0	
Jumlah	2.015.871.420	1.943.798.040	3,71

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp5.014.605.514-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.014.606.514,- dan Rp4.514.132.625,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
beban perjalanann biasa	2,427,103,130	1,934,967,182	25.43
beban perjalanan dinas dalam kota	48,580,000	17,035,000	185.18
beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota	1,938,812,020	2,323,981,100	-16.57
beban perjalanan dinas paket meeting luar kota	600,111,364	238,149,343	151.99
Jumlah	5,014,606,514	4,514,132,625	11.09

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp,0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang

bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			
Jumlah	0	0	

Beban Bantuan Sosial Rp 0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2018 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial			
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial			
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial			
Jumlah	0	0	

Beban

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Penyusutan
dan Amortisasi
Rp2.707.710.743,
-*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.707.710.743,- dan Rp2.309.692.220,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2018 dan 2017*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,272,863,225	1,356,931,471	(6)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,410,444,273	935,983,983	51
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	4,149,703	4,704,682	(12)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			
Jumlah Penyusutan	2,687,457,201	2,297,620,136	17
Beban Amortisasi Software	1,485,000	1,485,000	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya	-	-	
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	18,768,542	10,587,084	77
Jumlah Amortisasi	20,253,542	12,072,084	68
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,707,710,743	2,309,692,220	17

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun

2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2018
dan 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

D.11 Kegiatan Non Operasional

*Surplus/Defisit
dari Kegiatan
Non Operasional
(Rp26.206,009,-)*

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan aset non lancar	49,439,000	48,300,000	2.36
Beban Pelepasan Aset Non lancar	(29,125,000)	(173,649,800)	-83.23
Surplus (Defisit) pelepasan aset non lancar	20,314,000	(125,349,800)	-116.21
surplus dari kegiatan operasinal lainnya	5,892,009	25,772,884	-77.14
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	26,206,009	(99,576,916)	-126.32

*Defisit Pos
Luar Biasa*

*(Rp29,628,446,
939,-)*

D.12 Defisit Pos Luar Biasa

Defisit pos luar biasa tahun 2018 dan tahun 2017 sebesar Rp 29.628.446.939,- dan Rp 26.496.435.092,- Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan pelepasan aset BMN kendaraan melalui lelang.

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN
PERUBAHAN EKUITAS**

<i>Ekuitas Awal</i> <i>Rp52.212.992.037,-</i>	E.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp52.212.992.037,- dan Rp49.834.754.350,-.
<i>Defisit LO</i> <i>(Rp29.628.446.939,-)</i>	E.2 Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah defisit sebesar (Rp29.628.446.939,-) dan (Rp26.496.435.092,-). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional (belanja yang sering terjadi), kegiatan non operasional pelepasan aset non lancar kendaraan dinas dan kejadian luar biasa (tidak ada).
<i>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar</i> <i>Rp 0</i>	E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp 0.
<i>Penyesuaian Nilai Aset</i> <i>Rp 0</i>	E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai **E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan**

Persediaan

Rp 0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
1. Barang Konsumsi	-
2. Suku Cadang	-
3. Barang Persediaan Untuk Pemeliharaan	-
4. Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

Selisih

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi Aset

Tetap

Rp370.168.014.

177,-

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp370.168.014.177,- dan Rp2.540.000.107. Selisih revaluasi aset tetap tahun 2018 berasal dari penilaian ulang atas tanah satker - satker sebesar Rp 357. 137.735.694. Revaluasi gedung bangunan Tahun 2018 satker - satker sebesar Rp 13.030.278.483,-

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi
(Rp3.955.034.
222,-)*

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar (Rp 3.955.034.222,-) dan (Rp 827.630.497,-). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2018

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	(3,955,034,222)
Jumlah	(3,955,034,222)

Koreksi Lain-lain

lain Rp 0

E.3.6 Koreksi Lain-lain
Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi

E.4 Transaksi Antar Entitas

Antar Entitas

Rp28.918.607.306,-

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 28.918.607.306,- dan Rp 27.162.303.169,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN (Bendahara Umum Negara maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(60,450,979)
Ditagihkan ke Entitas Lain	28,979,058,285
Transfer Masuk	
Transfer Keluar	
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	28,918,607,306

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2018, DDEL sebesar Rp 60.450.979,- sedangkan DKEL berupa transaksi SP2D yang ditagihkan ke BUN sebesar Rp 28.979.058.285,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin		-
2	Persediaan		-
Jumlah			-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp0 yang merupakan transfer Persediaan

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,- dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2018.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp 0.

Rincian Pengesahan Hibah untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			
2			
3			
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Ekuitas Akhir

Rp

417.716.132.359,

-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp417.716.132.359,- dan Rp 52.212.992.037,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

**F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL
NERACA**

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca 31 Desember 2018.

Dan tidak ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk Laporan Keuangan Tahun 2018.

**VI. DAFTAR LAMPIRAN YANG TERDAPAT DALAM CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN INI SEBAGAI BAHAN PENDUKUNG DARI
LAPORAN KEUANGAN INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :**

1. NERACA

Terdiri dari Neraca Induk Wilayah Unit Eselon 1 Sekretariat Jenderal (01) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga terdiri dari Neraca :

- a. Kantor Kementerian Agama Kab. Belitung Timur (664035)
- b. Kantor Kementerian Agama Kab. Bangka Selatan (663021)
- c. Kantor Kementerian Agama Kab. Bangka Tengah (664014)
- d. Kantor Kementerian Agama Kab. Bangka Barat (664000)
- e. Kantor Wilayah Kementerian Agama Bangka Belitung (648652)
- f. Kantor Kementerian Agama Kab. Belitung (418569)
- g. Kantor Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang (418544)
- h. Kantor Kementerian Agama Kab. Bangka (418538)

2. NERACA PERCOBAAN KAS

Yang hanya terdiri dari Neraca Percobaan Kas Wilayah Unit Eselon 1 Sekretariat Jenderal (01) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. NERACA PERCOBAAN AKRUAL

Terdiri dari Neraca Percobaan Akrual Induk Wilayah Unit Eselon 1 Sekretariat Jenderal (01) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga terdiri dari Neraca Percobaan Akrual :

- a. Kantor Kementerian Agama Kab. Belitung Timur (664035)
- b. Kantor Kementerian Agama Kab. Bangka Selatan (663021)
- c. Kantor Kementerian Agama Kab. Bangka Tengah (664014)
- d. Kantor Kementerian Agama Kab. Bangka Barat (664000)
- e. Kantor Wilayah Kementerian Agama Bangka Belitung (648652)
- f. Kantor Kementerian Agama Kab. Belitung (418569)
- g. Kantor Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang (418544)
- h. Kantor Kementerian Agama Kab. Bangka (418538)

4. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Induk Wilayah Unit Eselon 1 Sekretariat Jenderal (01) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran :

- a. Kantor Kementerian Agama Kab. Belitung Timur (664035)
- b. Kantor Kementerian Agama Kab. Bangka Selatan (663021)
- c. Kantor Kementerian Agama Kab. Bangka Tengah (664014)

- d. Kantor Kementerian Agama Kab. Bangka Barat (664000)
- e. Kantor Wilayah Kementerian Agama Bangka Belitung (648652)
- f. Kantor Kementerian Agama Kab. Belitung (418569)
- g. Kantor Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang (418544)
- h. Kantor Kementerian Agama Kab. Bangka (418538)

5. LAPORAN OPERASIONAL

Terdiri dari Laporan Operasional Induk Wilayah Unit Eselon 1 Sekretariat Jenderal (01) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga terdiri dari Laporan Operasional :

- a. Kantor Kementerian Agama Kab. Belitung Timur (664035)
- b. Kantor Kementerian Agama Kab. Bangka Selatan (663021)
- c. Kantor Kementerian Agama Kab. Bangka Tengah (664014)
- d. Kantor Kementerian Agama Kab. Bangka Barat (664000)
- e. Kantor Wilayah Kementerian Agama Bangka Belitung (648652)
- f. Kantor Kementerian Agama Kab. Belitung (418569)
- g. Kantor Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang (418544)
- h. Kantor Kementerian Agama Kab. Bangka (418538)

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Terdiri dari Laporan Perubahan Ekuitas Induk Wilayah Unit Eselon 1 Sekretariat Jenderal (01) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga terdiri dari Laporan Perubahan Ekuitas :

- a. Kantor Kementerian Agama Kab. Belitung Timur (664035)
- b. Kantor Kementerian Agama Kab. Bangka Selatan (663021)
- c. Kantor Kementerian Agama Kab. Bangka Tengah (664014)
- d. Kantor Kementerian Agama Kab. Bangka Barat (664000)
- e. Kantor Wilayah Kementerian Agama Bangka Belitung (648652)
- f. Kantor Kementerian Agama Kab. Belitung (418569)
- g. Kantor Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang (418544)
- h. Kantor Kementerian Agama Kab. Bangka (418538)

